RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota TarakanTahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, melalui Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Tarakan, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina / IV a
NIP. 19720822 2010011 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 60
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 60
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 73
4.1. Program dan Kegiatan 73
4.2. Pendanaan 73
BAB V PENUTUP 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2023 12
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 27
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 37
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 63
Tabel 5 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 64
Tabel 6 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 .. 74

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi dan Rencana Strategis Transisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 - 2026, dimana tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke pertama dalam periode Renstra Transisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota TarakanTahun 2025 – 2026 yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan.

Memperhatikan surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 050/06/Bappeda-Litbang tanggal 06 Januari 2023 tentang Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka disusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025.

Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib non pelayanan dasar yang mengacu pada IKU dan IKK sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

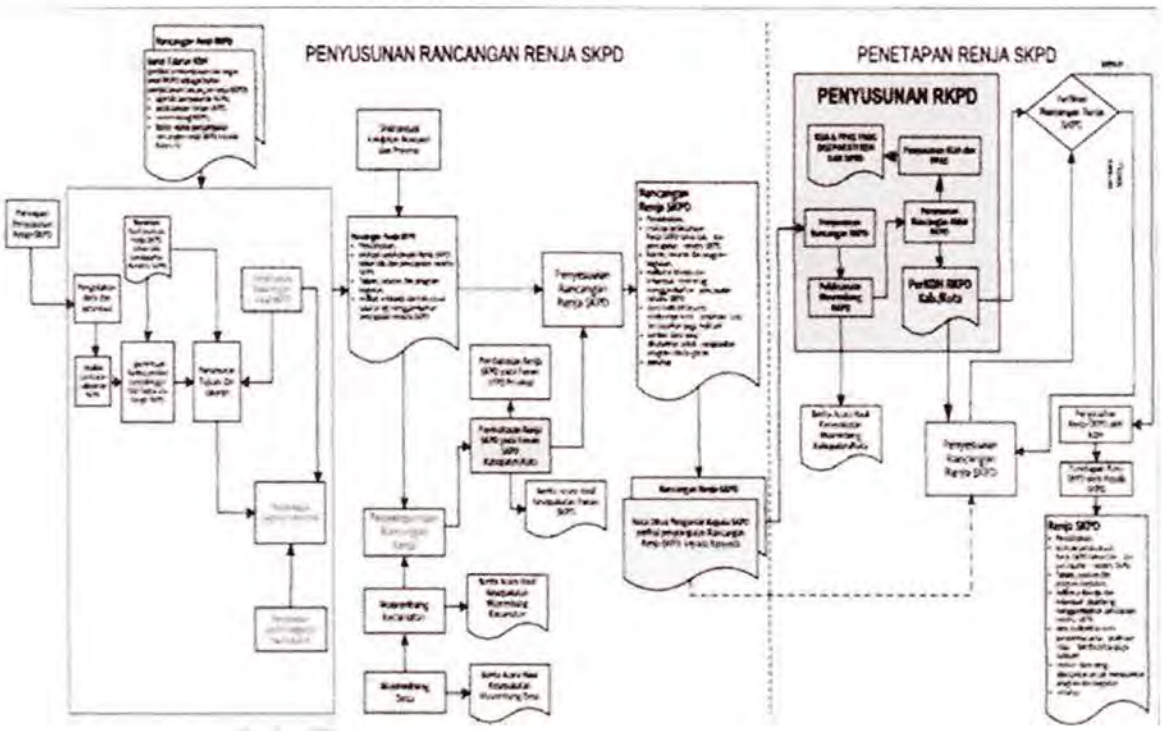

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan rencana pembangunan

jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

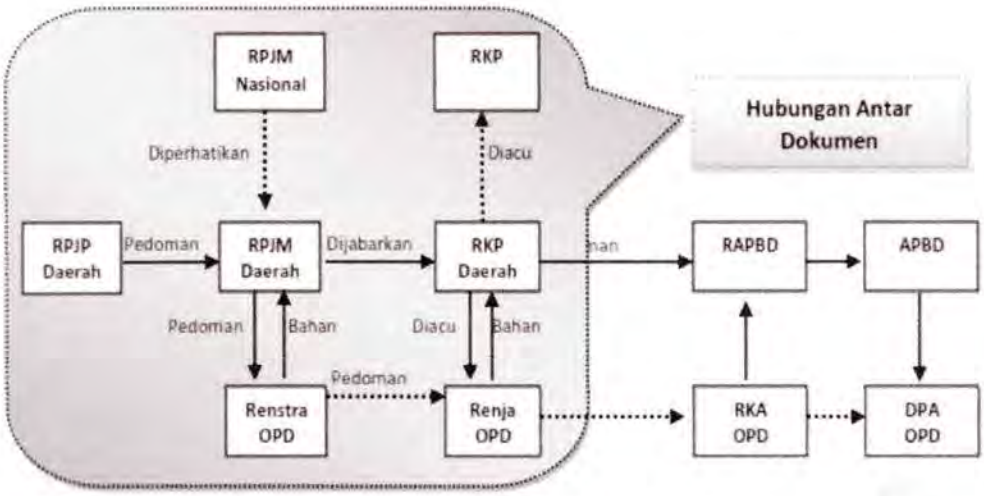

Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Evaluasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepaan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
29. Peraturan Wali Kota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Adapun Maksud dari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025;
2. Untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke dalam Perencanaan

Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan

3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026;
2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota TarakanTahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun lalu (2023), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 9 (sembilan) Program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.549.382.076,-** dengan realisasi sebesar **Rp.6.786.040.886,-** atau **89,89%.**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.8.01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100 %**		
2.8.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu*	*4 Layanan*	*2 layanan*	*4 Layanan*	*2 layanan*	*50 %*	*4 layanan*		
2.8.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 orang/bln	26 orang	26 Orang	26 Orang	100 %	27 orang/bln	-	-
2.8.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	-	-
2.8.01.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana*	*5 Layanan*	5 layanan	*5 Layanan*	*5 Layanan*	*100 %*	*1 layanan*		

2.8.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia; Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan Kantor yang tersedia	1 paket	567 jenis	200; 100 Jenis	200; 100 Jenis	100 %	1 paket	-	-
2.8.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 paket	54 jenis, 9253 lembar	24 Jenis, 3 Jenis, 9.395 lembar	24 Jenis, 3 Jenis, 9.395 lembar	100 %	1 paket	-	-
2.8.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	7 Laporan	4 kali	7 Kali	7 Kali	100 %	7 Laporan	-	-
2.8.01.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia*	*5 Layanan*	2 Layanan	*5 Layanan*	*5 layanan*	*100 %*	*2 layanan*		
2.8.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket pengiriman yang tersedia	1 laporan	90 lembar	100 Lembar	100 Lembar	100 %	1 laporan	-	-
2.8.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan	1 laporan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	1 laporan	-	-
2.8.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah aset/BMD yang dipelihara*	*36 Unit*	*8 unit*	*40 Unit*	*40 Unit*	*100 %*	*38 unit*		
2.8.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	8 unit	0	8 Unit	8 Unit	100 %	8 unit	-	-
2.8.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	14 unit	32 unit	16 Unit	16 Unit	100 %	14 unit	-	-

2.8.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 unit	7 unit	15 Jenis	15 Jenis	100 %	15 unit	-	-
2.8.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	1 Unit	-	-
2.8.02..	**Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**1. Cakupan PUG yang aktif**	**53%**	**-**	**33%**	**na**	**na**			
		2. Persentase ARG pada APBD	**12%**	**-**	**10%**	**54%**	**18,62%**			
2.8.02.2.03.	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah lembaga yang dibina*	*2 organisasi*	*2 organisasi*	*2 lembaga*	*2 lembaga*	*100 %*	*2 organisasi*	-	-
2.8.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga perempuan yang mendapatkan bantuan	50 orang	2 organisasi	2 lembaga	2 lembaga	100 %	50 orang	-	-
2.8.03..	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**			
		Rasio kekerasan terhadap peremp termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	**17,95**	**16 kasus**	**18,5%**	**26,25%**	**141,91%**			
2.8.03.2.01.	*Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan*	*20 kegiatan*	*15 kegiatan*	*20 Kegiatan*	*20 Kegiatan*	*100 %*	*20 kegiatan*	-	-

2.8.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	20 dokumen	15 koordinasi	20 Koordinas	20 Koordinas	100 %	20 dokumen	-	-
2.8.03.2.02.	*Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah kasus yang mendapat pelayanan*	*20 kasus*	*15 kasus*	*20 kasus*	*34 kasus*	*170%*	*20 kasus*	-	-
2.8.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	20 layanan	15 kegiatan	20 kegiatan	34 kegiatan	170 %	20 layanan	-	-
2.8.04..	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak**	**-**	**-**	**30 Persen**			**35 persen**	**-**	**-**
2.8.04.2.01.	*Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi kesetaraan gender dan hak anak*	*12 dokumen*	-	*100 keluarga*	*100 keluarga*	*100%*	*12 dokumen*	-	-
2.8.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	-	80 orang	80 orang	100 %	4 laporan	-	-

2.8.04.2.02.	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan*	*2 organisasi*	-	*2 organisasi*	*2 organisasi*	*100%*	*2 organisasi*	-	-
2.8.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	-	70 Orang	70 Orang	100 %	30 orang	-	-
2.8.06..	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase pemenuhan indikator KLA**	**62,50%**		**33,33 persen**	**60%**	**200%**	**50 persen**	-	-
2.8.06.2.01.	*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk*	*1 gugus tugas*	*1gugus tugas*	*1 gugus tugas*	*1 gugus tugas*	*100%*	*1 gugus tugas*	-	-
2.8.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	1 gugus tugas	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	24 dokumen	-	-
2.8.07..	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait**	**0,020%**	**30 kasus**	**0,022%**	**0,078%**	**352,50%**	**0,021%**	-	-
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-
2.8.07.2.01.	*Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang*	*Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan*	*7 Kegiatan*	*2 kegiatan*	*3 kegiatan*	*3 kegiatan*	*100%*	*7 Kegiatan*	-	-

	Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*terhadap anak*								
2.8.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	5 kegiatan	95 Orang	95 Orang	100 %	4 dokumen	-	-
2.8.07.2.02.	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah kasus anak*	*20 kasus*	*30 kasus*	*20 kasus*	*91 kasus*	*455 %*	*20 kasus*	-	-
2.8.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	8 layanan	30 kasus	20 layanan	91 layanan	455 %	8 layanan	-	-
2.8.07.2.03.	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yeng memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan*	*5 lembaga*	-	*7 lembaga*	*7 lembaga*	*100%*	*7 lembaga*	-	-
2.8.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	-	25 Orang	25 Orang	100 %	7 dokumen	-	-

2.14.2..	**Program Pengendalian Penduduk**	**Persentase keluarga yang terdata**	**35,53%**	**na**	**17 Persen**	**na**	**na**	**26,56%**	**-**	**-**
		TFR	**2,24**	**na**	**2,28 INDEKS**	**2,44**	**107,02%**	**2,25**	**-**	**-**
		Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	**25**	**na**	**25 Tahun**	**23**	**93,16%**	**25**	**-**	**-**
2.14.2.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	9 unit	4.500 data	4.500 data	100 %	1 dokumen	-	-
2.14.2.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	36 faskes	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	1 dokumen	-	-
2.14.3..	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)**	**66,15%**	**82,67%**	**64,04%**	**58,06%**	**92,22%**	**65,15%**	**-**	**-**
		Unmeet need	**23,50%**	**na**	**24,06%**	**24,25%**	**100,79%**	**24%**	**-**	**-**
		Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	**65,00%**	**na**	**50%**	**56%**	**110%**	**60%**	**-**	**-**
2.14.3.2.01.	*Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal*	*Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB*	7 layanan					*5 layanan*	-	-
2.14.3.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	6 dokumen	3 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	6 dokumen	-	-

		Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
2.14.3.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 dokumen	41 buah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	5 dokumen	-	-
2.14.3.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah penggunaan Media Elektronik dan penggunaan media lainnya	4 dokumen	4 kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	50,00%	0	-	-
2.14.3.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	1 laporan	-	-
2.14.3.2.02.	*Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	*Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif*	*16 orang*	*17 orang*	*17 orang*	*17 orang*	*100%*	*17 orang*	-	-
2.14.3.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4 organisasi	16 kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	4 organisasi	-	-
2.14.3.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	80 orang	160 orang	80 Kader	80 Kader	100 %	80 orang	-	-

		Pedesaan (IMP)								
2.14.3.2.03.	*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah pelayanan KB*	*3 pelayanan*	*3 layanan*	*1 laporan*	*1 laporan*	*100 %*	*3 layanan*	-	-
2.14.3.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	36 faskes	22 Faskes	15 Faskes	68,18 %	1 laporan	-	-
2.14.3.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	144 orang	60 orang	144 Orang	700 Orang	486,11 %	144 orang	-	-
2.14.3.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	24 unit	85 unit	6 unit	6 unit	100 %	24 unit	-	-
2.14.3.2.04.	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	*Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolan program KKBPK*	*85 mitra kerja*	*85 linsek*	*80 mitra kerja*	*80 mitra kerja*	*100 %*	*80 mitra kerja*	-	-
2.14.3.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah pembinaan kampung KB	4 laporan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	4 laporan	-	-
2.14.4..	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**-**	**-**

2.14.4.2.01.	*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	*Jumlah kegiatan*	*12 kegiatan*	*1 kegiatan*	*12 kegiatan*	*12 kegiatan*	*100 %*	*5 kegiatan*	-	-
2.14.4.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	31 kelompok	600 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	27 kelompok	-	-
2.14.4.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 unit	-	25 Kelompok	25 Kelompok	100 %	27 unit	-	-

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

   Adapun capaian realisasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 2 indikator. Indikator pertama adalah cakupan PUG yang aktif, sayangnya data capaian dari bidang belum ada dari target yang ditentukan yaitu 33 % disebabkan karena pengukuran yang sulit dilakukan. Indikator kedua adalah persentase ARG pada APBD dengan target 11% dan capaiannya 31,51%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,59% dengan realisasi keuangan sebesar 99,16%. Realisasi fisik dan keuangan masuk dalam kreteria sangat tinggi

2. Program Perlindungan Perempuan

   Adapun rata-rata capaian realisasi Program Perlindungan Perempuan dengan 2 indikator. Indikator pertama adalah persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang terlayani dengan target 100% dan realisasi mencapai 100%. Indikator kedua adalah rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan realisasi fisik sebesar 98,21% sedangkan realisasi keuangan sebesar 80,93% masuk dalam kreteria sangat tinggi dan untuk realisasi keuangan masuk kreteria tinggi.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

   Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Peningkatan Kualitas Keluarga mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,96% yang masuk dalam kreteria sangat tinggi.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,96% yang masuk dalam kreteria sangat tinggi.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

   Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Perlindungan Khusus Anak mencapai 97,32% dan realisasi keuangan sebesar 91,93%. Realisasi fisik dan keuangan masuk dalam kreteria sangat tinggi

6. Program Pengendalian Penduduk

   Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pengendalian Penduduk mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 84,38% yang masuk dalam kreteria tinggi.

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana

   Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pembinaan Keluarga Berencana mencapai 98,67% dan realisasi keuangan sebesar 92,82%. Realisasi fisik masuk dalam kreteria sangat tinggi dan untuk realisasi keuangan masuk kreteria tinggi.

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

   Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) mencapai 99,90% dan realisasi keuangan sebesar 78,49%. Realisasi fisik masuk dalam kreteria sangat tinggi sedangkan untuk realisasi keuangan masuk kreteria sedang. Hal ini terjadi karena dana tidak terserap maksimal dikarenakan beberapa masalah teknis di lapangan tidak terserapnya anggaran transport serta pulsa oleh kader. Harga BKB Kit yang mengalami banyak penurunan dari harga penawaran awalnya.

9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai 99,97% dan realisasi keuangan sebesar 90,97% yang masuk dalam kreteria sangat sangat tinggi.

Dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam peningkatan pelayanan adalah :

1. Anggaran yang dari DAK Non Fisik BOKB tidak terserap maksimal karena penuruanan harga BKB Kit dari harga penawaran awal sehingga terjadi SILPA.

2. Kader yang tidak mengumpulakan laporan bulanan sehingga tunjangan pulsa dan transport bagi kader tidak terserap secara optimal.
3. Masalah teknis upaya penanggulangan stunting di lapangan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN.

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerja sama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakanmengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan evaluasi capaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum sampai dengan tahun 2023 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam peningkatan pemberian pelayanan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat pada **tabel 2** berikut ini :

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target IKU/IKK	Target Renstra Tahun 2019 s/d 2024					Realisasi Capaian	Proyeksi tahun	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	12	13
1	IPG		92,10	91,90	92	92,10	92,29	92,30	92.73	92,30	
2	IDG		59,93	59,72	59,73	59,93	60,13	60,33	58.61	60,33	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan		18,50	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	9,23	17,95	
4	Rasio Kekerasan terhadap Anak		18,50	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,40	17,95	
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)		64,15	63,13	63,15	64,15	65,15	66,15	66,65	66,15	
6	Nilai SAKIP		70	65,82	68	70	71	72	77,69	72	
7	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		10	na	10	10	11	12	30,51	12	
8	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait		100	100	100	100	100	100	100	100	
9	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,28	2,3	2,29	2,28	2,25	2,24	2,28	2,24	
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeed need)		24,25	25,98	24,50	24,25	24,00	23,50	14,20	23,50	
11	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		7	5	5	7	8	10	30	10	
12	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		na	na	na	na	na	na	na	na	

13	Jumlah media massa (cetak,eletronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		na	na	na	na	na	na	na	na	
14	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		na	na	na	na	na	na	na	na	
15	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		na	na	na	na	na	na	1 lembaga	na	
17	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD Kab/Kota)		na	na	na	na	na	na	na	na	
18	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		na	na	na	na	na	na	na	na	
19	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		na	na	na	na	na	na	na	na	
20	Tersedianya dokumen Gran Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Blm ada	Blm ada	Blm ada	Blm ada	Blm ada	Blm ada	Blm ada	Blm ada	
21	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita Umur 25-49 tahun		25	na	25	25	25	25	22	25	
22	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		25,518	na	na	na	na	na	20,21	na	
23	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)		55	na	50	55	60	65	81,58	65	
24	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dan pengelolaan program KKBPK		171 mitra	na	na	na	na	na	171 mitra	na	

25	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100	na	na	na	na	na	100	na	
26	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ)		5,93	na	na	na	na	na	24,83	na	
27	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		81	na	na	na	na	na	127	na	
28	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		59,82	na	na	na	na	na	32,85	na	
29	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		27,625	na	na	na	na	na	14,59	na	
30	Persentase kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		37,30	na	na	na	na	na	10,44	na	

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan di analisis merupakan berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Hasil evaluasi tehadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2023 adalah sebagai berikut: :

1. Masalah capaian indikator rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 perempuan yang lebih besar dari target. Indikator ini adalah indikator negatif jadi yang diharapkan adalah semakin kecil nilai capaian dari target.
   Hal ini terjadi bisa karena semakin banyaknya masyarakat yang terpapar akan informasi sehingga saat ada kejadian kekerasan yang menimpa perempuan baik dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga mereka peduli dan berani melaporkan. Sehingga timbul peningkatan dari jumlah kasus yang ada.
2. Hal yang sama terjadi pada indikator rasio kekerasan terhadap anak meski masih dibawah target. Indikator ini adalah indikator negatif juga. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak dalam jumlah yang melampaui target yang ditentukan.
3. Masih tingginya indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeed need) dari target yang ditetapkan. Banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain keakuratan data, kurang efektifnya pembinaan kader pengumpul data di lapangan, penyampaian kuisioner pada aseptor yang kurang maksimal dimengerti oleh responden.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada **Tabel 3** di bawah ini

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**5.774.403.139**				**5.774.403.139**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Tarakan**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**4.257.024.026**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tarakan**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**4.257.024.026**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Tarakan***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia***	***8 Dokumen***	***10.000.000***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tarakan***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia***	***8 Dokumen***	***10.000.000***	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Tarakan***	***Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan***	***4 Layanan***	***3.696.214.978***	***Administrasi Keuangan Perangkat***	***Tarakan***	***Jumlah layanan Administrasi Keuangan***	***4 Layanan***	***3.696.214.978***	

			tepat waktu			***Daerah***		***yang diselesaikan tepat waktu***			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bln	3.637.288.978	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bln	3.637.288.978	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	58.926.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	58.926.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Tarakan***	***Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian***	***0 Layanan***	***0***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Tarakan***	***Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian***	***0 Layanan***	***0***	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tarakan	Jumlah sarpras disiplin pegawai	0 Unit	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tarakan	Jumlah sarpras disiplin pegawai	0 Unit	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarakan	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	0 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarakan	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	0 Paket	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Tarakan***	***Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana***	***3 Layanan***	***62.417.700***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Tarakan***	***Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana***	***3 Layanan***	***62.417.700***	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	24.996.060	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	24.996.060	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.979.840	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.979.840	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	32.441.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	32.441.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Tarakan***	***Jumlah aset/BMD yang diadakan***	***7 Unit***	***44.277.850***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Tarakan***	***Jumlah aset/BMD yang diadakan***	***7 Unit***	***44.277.850***	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	44.277.850	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	44.277.850	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Tarakan***	***Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia***	***2 Layanan***	***73.516.021***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tarakan***	***Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia***	***2 Layanan***	***73.516.021***	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	71.516.021	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	71.516.021	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Tarakan***	***Jumlah aset/BMD yang dipelihara***	***35 Unit***	***45.363.334***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Tarakan***	***Jumlah aset/BMD yang dipelihara***	***35 Unit***	***45.363.334***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Tarakan	Jumlah Kendaraan	8 unit	2.709.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Tarakan	Jumlah Kendaraan	8 unit	2.709.000	

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	32.784.334	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	32.784.334	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000	
	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	**Tarakan**	**1. Cakupan PUG yang aktif**	12%	**215.000.000**	**Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Tarakan**	**1. Cakupan PUG yang aktif**	12%	**215.000.000**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG***	**1 lembaga**	**15.000.000**	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG***	**1 lembaga**	**15.000.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tarakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	30 orang	13.842.640	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tarakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	30 orang	13.842.640	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	***Tarakan***	***Jumlah lembaga yang dibina***	**2 organisasi**	**250.000.000**	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia***	***Tarakan***	***Jumlah lembaga yang dibina***	**2 organisasi**	**2560.000.000**	

	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					***Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota***					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 organisasi	250.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 organisasi	250.000.000	
	Program Perlindungan Perempuan	**Tarakan**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani**	**100%**	**147.651.920**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Tarakan**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani**	**100%**	**147.651.920**	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan***	***1 kegiatan***	***20.041.860***	***Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan***	***1 kegiatan***	***20.041.860***	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	20.041.860	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	20.041.860	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	***Tarakan***	***Jumlah kasus yang mendapat pelayanan***	***90 kasus***	***108.758.360***	***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan***	***Tarakan***	***Jumlah kasus yang mendapat pelayanan***	***80 kasus***	***108.758.360***	

	yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					***Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota***					
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	15.369.500	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 orang	15.369.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	93.388.860	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	93.388.860	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi***	***1 Lembaga***	***18.851.700***	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi***	***1 Lembaga***	***18.851.700***	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	50 Orang	18.851.700	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Tarakan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	50 Orang	18.851.700	

			Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			Kabupaten/Kota		Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	**Tarakan**	**Persentase Puspusga yang aktif**	**25%**	**45.649.290**	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Tarakan**	**Persentase Puspusga yang aktif**	**25%**	**45.649.290**	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi***	***100 keluarga***	***23.346.570***	***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi***	***100 keluarga***	***23.346.570***	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	13.946.700	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	13.946.700	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.399.870	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.399.870	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	***Tarakan***	***Jumlah organisasi yang dikuatkan dan***	***2 organisasi***	***12.362.920***	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga***	***Tarakan***	***Jumlah organisasi yang***	***2 organisasi***	***12.362.920***	

	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		***dikembangkan***			***Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***		***dikuatkan dan dikembangkan***			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362.920	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362.920	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak***	***40 layanan***	***9.939.800***	***Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak***	***40 layanan***	***9.939.800***	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 layanan	9.939.800	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah	40 layanan	9.939.800	

								Kabupaten/Kota yang Tersedia			
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Tarakan**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak**	**100%**	**5.451.960**	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**Tarakan**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak**	**100%**	**5.451.960**	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah dokumen responsif gender***	***1 dokumen***	***5.451.960***	***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah dokumen responsif gender***	***1 dokumen***	***5.451.960***	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.451.960	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.451.960	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Tarakan**	**Ketercapaian nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak**	**875**	**500.000.000**	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Tarakan**	**Ketercapaian nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak**	**875**	**500.000.000**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk***	***1 Gugus Tugas***	***250.000.000***	***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk***	***1 Gugus Tugas***	***250.000.000***	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Tarakan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non	39 organisasi	55.659.360	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Tarakan	Jumlah Organisasi Pemerintah,	39 organisasi	55.659.360	

	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	37.705.320	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	37.705.320	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tarakan**	***Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif***	***4 Lembaga***	***171.886.420***	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota***	**Tarakan**	**Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif**	***4 Lembaga***	***171.886.420***	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	1 dokumen	150.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 dokumen	150.000.000	

			Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	21.886.420	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	21.886.420	
	Program Perlindungan Khusus Anak	**Tarakan**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait**	**0,020%**	**315.362.750**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Tarakan**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait**	**0,020%**	**315.362.750**	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak***	***4 kegiatan***	***30.084.000***	***Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak***	***4 kegiatan***	***30.084.000***	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan kekeran terhadap anak	4 kegiatan	30.084.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan kekeran terhadap anak	4 kegiatan	30.084.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	Jumlah kasus anak	***90 kasus***	***30.084.000***	***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah kasus anak***	***80 kasus***	***30.084.000***	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Tarakan	Jumlah Anak yang	90 kasus	22.635.197	Penyediaan Layanan	Tarakan	Jumlah Anak yang	80 kasus	22.635.197	

	bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota		Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten /Kota		Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1 laporan	84.224.530	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1 laporan	84.224.530	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota***	***5 lembaga***	***55.362.750***	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota***	***5 lembaga***	***55.362.750***	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	1 Laporan	1.000.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	1 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Tarakan	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan	20 orang	20.392.360	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah	Tarakan	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan	20 orang	20.392.360	

			Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)			kabupaten/kota		Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**1.148.478.861**					**1.148.478.861**	
	Program Pengendalian Penduduk	**Tarakan**	**Persentase keluarga yang terdata**	**50%**	**90.237.520**	**Program Pengendalian Penduduk**	**Tarakan**	**Persentase keluarga yang terdata**	**50%**	**90.237.520**	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah dokumen data keluarga***	***1 dokumen***	***90.237.520***	***Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah dokumen data keluarga***	***1 dokumen***	***90.237.520***	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tarakan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	14.400.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tarakan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	14.400.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tarakan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	49.958.800	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tarakan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	49.958.800	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tarakan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4900 laporan	20.878.720	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tarakan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4900 laporan	20.878.720	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tarakan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	5.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tarakan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	5.000.000	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	**Tarakan**	**Persentase masyarakat**	**66,15%**	**826.120.061**	**Program Pembinaan**	**Tarakan**	**Persentase pemakaian**	**66,15%**	**826.120.061**	

	(KB)		**yang terpapar isi program KKBPK)**			**Keluarga Berencana (KB)**		**kontrasepsi modern (mCPR)**			
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	***Tarakan***	***Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB***	***3 layanan***	***68.518.800***	***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal***	***Tarakan***	***Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB***	***3 layanan***	***68.518.800***	
	Pengendalian Program KKBPK	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	2.000.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	2.000.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	32.948.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	32.948.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	Tarakan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	1 laporan	6.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tarakan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	1 laporan	6.000.000	

			Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tarakan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	2.800.000	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Tarakan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	2.800.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	14.770.800	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	14.770.800	
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tarakan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 organisasi	10.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tarakan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	10 organisasi	10.000.000	

			kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	***Tarakan***	***Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif***	***17 orang***	***10.000.000***	***Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)***	***Tarakan***	***Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif***	***17 orang***	***10.000.000***	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tarakan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	10.000.0000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tarakan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	10.000.0000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	***Tarakan***	***Jumlah pelayanan KB***	***4 layanan***	***4.000.000***	***Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota***	***Tarakan***	***Jumlah pelayanan KB***	***4 layanan***	***4.000.000***	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tarakan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tarakan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	148 orang	1.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	148 orang	1.000.000	

			(MKJP)					(MKJP)			
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tarakan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	1.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tarakan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	1.000.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	***Tarakan***	***Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolan program KKBPK***	***85 mitra kerja***	***2.000.000***	***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB***	***Tarakan***	***Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolan program KKBPK***	***85 mitra kerja***	***2.000.000***	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	1.000.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	1.000.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1 dokumen	1.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga	1 dokumen	1.000.000	

								Berkualitas			
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Tarakan**	**Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**100%**	**86.599.500**	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Tarakan**	**Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**100%**	**86.599.500**	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	***Tarakan***	***Jumlah kegiatan***	***2 kegiatan***	***76.599.500***	***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	***Tarakan***	***Jumlah kegiatan***	***2 kegiatan***	***76.599.500***	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	10.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	10.000.000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Tarakan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	20 unit	9.999.500	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Tarakan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	20 unit	9.999.500	

	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	20 orang	46.600.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	20 orang	46.600.000	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Tarakan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	10.000.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Tarakan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	10.000.000	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	***Tarakan***	***Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan***	***2 organisasi***	***10.000.000***	***Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/ Kota dalam Pembangunan***	***Tarakan***	***Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui***	***2 organisasi***	***10.000.000***	

	Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga		***Ketahanan danKesejahteraan Keluarga***			***Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga***		***Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga***			
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tarakan	Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000		Tarakan	Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Tabel .....
DAFTAR USULAN (ASPIRASI) MASYARAKAT DINAS .....
TAHUN 2025

No.	Program kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Besaran volume	Pagu	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2026, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 merupakan tahun pertama pembangunan jangka menengah daerah dan mempunyai peranan penting dalam perwujudan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota TarakanTahun 2025 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan COVID- I 9, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

B. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2021-2026 memasuki tahun kelima. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026, maka ditetapkan tema atau fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 :

"Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal"

Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 harus diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas, meliputi: (1) industri primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan; (2) industri pengolahan; (3) industri ketenagalistrikan; (4) industri perdagangan dan jasa; (5) industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (6) industri kecil dan menengah, dan industri lainnya. Karena, industri-industri tersebut merupakan industri yang menopang hajat hidup masyarakat sekaligus sebagai industri yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industrinya. Selain itu, pengembangan dan penguatan industri-industri tersebut berarti mendorong terjadinya peningkatan investasi. Namun, peningkatan investasi dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender

   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

   a. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

   a. Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak
3. Meningkatnya Keluarga Sejahtera

   Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

   a. Mewujudkan Keluarga Berkualitas

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun 2025
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	IPG	92,73	92,80
			IDG	58,61	60,13
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE)		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	0,091	0,03
	Indeks Perlindungan Anak	Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	0,733	0,12
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Mewujudkan keluarga berkualitas	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	66,65	67,2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.	8.	..			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5.774.403.139**	**APBD**			**5.774.403.139**
2.	**8.**	**01.**	**.**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**Tarakan**	**100%**	**4.257.024.026**	**APBD**		**100%**	**4.257.024.026**
2.	***8.***	***01.***	***2.01***		***Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia***	***Tarakan***	***8 dokumen***	***10.000.000***	***APBD***		***8 dokumen***	***10.000.000***
2.	8.	01.	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
2.	***8.***	***01.***	***2.02.***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu***	***Tarakan***	***4 Layanan***	***3.696.214.978***	***APBD***		***4 Layanan***	***3.696.214.978***
2.	8.	01.	2.02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	27 orang/bln	3.637.288.978	APBD		27 orang/bln	3.637.288.978
2.	8.	01.	2.02.	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	1 dokumen	58.926.000	APBD		1 dokumen	58.926.000
2.	***8.***	***01.***	***2.05.***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian***	***Tarakan***	***0 Layanan***	***0***	***APBD***		***0 Layanan***	***0***
2.	8.	01.	2.05.	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	Tarakan	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0
2.	8.	01.	2.05.	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	Tarakan	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0
2.	***8.***	***01.***	***2.06.***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana***	***Tarakan***	***3 Layanan***	***62.417.700***	***APBD***		***3 Layanan***	***62.417.700***

					yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia							
2.	**8.**	**05.**	**.**		**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak**	**Tarakan**	**100%**	**5.451.960**	**APBD**		**100%**	**5.451.960**
2.	***8.***	***05.***	***2.01.***		***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen responsif gender***	***Tarakan***	***1 dokumen***	***5.451.960***	***APBD***		***1 dokumen***	***5.451.960***
2.	8.	05.	2.01.	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	5.451.960	APBD		1 dokumen	5.451.960
2.	**8.**	**06.**	**.**		**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Ketercapaian nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak**	**Tarakan**	**875**	**265.251.100**	**APBD**		**880**	**265.251.100**
2.	***8.***	***06.***	***2.01.***		***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk***	***Tarakan***	***1 Gugus Tugas***	***93.364.680***	***APBD***		***1 Gugus Tugas***	***93.364.680***
2.	8.	06.	2.01.	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Tarakan	39 organisasi	55.659.360	APBD		39 organisasi	0055.659.360
2.	8.	06.	2.01.	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	37.705.320	APBD		1 Dokumen	37.705.320
2.	***8.***	***06.***	***2.02.***		***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif***	***Tarakan***	***4 lembaga***	***171.886.420***	***APBD***		***4 lembaga***	***171.886.420***
2.	8.	06.	2.02.	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	150.000.000	APBD		1 dokumen	150.000.000
2.	8.	06.	2.02.	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	21.886.420	APBD		1 dokumen	21.886.420
2.	**8.**	**07.**	**.**		**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase korban kekerasan anak yang terlayani**	**Tarakan**	**100%**	**81.560.360**	**APBD**		**100%**	**81.560.360**
2.	***8.***	***07.***	***2.01.***		***Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak***	***Tarakan***	***4 kegiatan***	***30.084.000***	***APBD***		***4 kegiatan***	***30.084.000***
2.	8.	07.	2.01.	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Tarakan	39 orang	30.084.000	APBD		39 orang	30.084.000

2.	***8.***	***07.***	***2.02.***		***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah kasus anak***	***Tarakan***	***90 kasus***	***30.084.000***	***APBD***		***80 kasus***	***106.859.727***
2.	8.	07.	2.02.	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	90 kasus	22.635.197	APBD		80 kasus	22.635.197
2.	8.	07.	2.02.	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Tarakan	1 laporan	84.224.530	APBD		1 laporan	84.224.530
2.	***8.***	***07.***	***2.03.***		***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yeng memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan***	***Tarakan***	***5 lembaga***	***21.392.360***	***APBD***		***5 lembaga***	***21.392.360***
2.	8.	07.	2.03.	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Tarakan	1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000
2.	8.	07.	2.03.	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)	Tarakan	20 orang	20.392.360	APBD		20 orang	20.392.360
2.	14	...			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		Tarakan		**252.355.820**	APBD			**252.355.820**
2.	**14**	**.2.**	**.**		**Program Pengendalian Penduduk**	**Persentase keluarga yang terdata**	**Tarakan**	**50%**	**90.237.520**	**APBD**		**65%**	**90.237.520**
2.	***14***	***.2.***	***2.02.***		***Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen data keluarga***	***Tarakan***	***1 dokumen***	***90.237.520***	***APBD***		***1 dokumen***	***90.237.520***
2.	14	.2.	2.02.	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tarakan	1 dokumen	14.400.000	APBD		1 dokumen	14.400.000
2.	14	.2.	2.02.	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tarakan	1 dokumen	49.958.800	APBD		1 dokumen	49.958.800
2.	14	.2.	2.02.	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tarakan	4900 laporan	20.878.720	APBD		4900 laporan	20.878.720
2.	14	.2.	2.02.	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data PengendalianLapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tarakan	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.000.000
2.	**14**	**.3.**	**.**		**Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)**	**Persentase masyarakat yang terpapar isi program KKBPK**	**Tarakan**	**84%**	**74.518.800**	**APBD**		**86%**	**74.518.800**
2.	***14***	***.3.***	***2.01.***		***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal***	***Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB***	***Tarakan***	***3 layanan***	***68.518.800***	***APBD***		***3 layanan***	***68.518.800***
2.	14	.3.	2.01.	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Tarakan	1 laporan	2.000.000	APBD		1 laporan	2.000.000
2.	14	.3.	2.01.	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Tarakan	1 laporan	32.948.000	APBD		1 laporan	32.948.000

						(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							
2.	14	.3.	2.01.	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tarakan	1 laporan	6.000.000	APBD		1 laporan	6.000.000
2.	14	.3.	2.01.	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tarakan	1 Dokumen	2.800.000	APBD		1 Dokumen	2.800.000
2.	14	.3.	2.01.	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tarakan	1 dokumen	14.770.800	APBD		1 dokumen	14.770.800
2.	14	.3.	2.01.	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tarakan	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	10.000.000
2.	***14***	***.3.***	***2.02.***		***Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)***	***Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif***	***Tarakan***	***16 orang***	***1.000.000***	***APBD***		***16 orang***	***1.000.000***
2.	14	.3.	2.02.	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tarakan	80 orang	1.000.000	APBD		80 orang	1.000.000
2.	***14***	***.3.***	***2.03.***		***Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah pelayanan KB***	***Tarakan***	***4 pelayanan***	***3.000.000***	***APBD***		***4 pelayanan***	***3.000.000***
2.	14	.3.	2.03.	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tarakan	1 laporan	1.000.000	APBD		1 laporan	1.000.000
2.	14	.3.	2.03.	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tarakan	148 orang	1.000.000	APBD		148 orang	1.000.000
2.	14	.3.	2.03.	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tarakan	1 unit	1.000.000	APBD		1 unit	1.000.000
2.	14	.3.	2.03.	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	Tarakan	1 laporan	1.000.000	APBD		1 laporan	1.000.000

					Jejaringnya	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
2.	***14***	***.3.***	***2.04.***		***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB***	***Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolan program KKBPK***	***Tarakan***	***85 mitra kerja***	***2.000.000***	***APBD***		***85 mitra kerja***	***2.000.000***
2.	14	.3.	2.04.	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tarakan	1 dokumen	1.000.000	APBD		1 dokumen	1.000.000
2.	14	.3.	2.04.	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tarakan	1 dokumen	1.000.000	APBD		1 dokumen	1.000.000
2.	**14**	**.4.**	**.**		**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**Tarakan**	**100%**	**86.599.500**	**APBD**		**100%**	**86.599.500**
2.	***14***	***.4.***	***2.01.***		***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	***Jumlah kegiatan***	***Tarakan***	***2 kegiatan***	***76.599.500***	***APBD***		***2 kegiatan***	***76.599.500***
2.	14	.4.	2.01.	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tarakan	1 laporan	10.000.000	APBD		1 laporan	10.000.000
2.	14	.4.	2.01.	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Tarakan	20 unit	9.999.500	APBD		20 unit	9.999.500
2.	14	.4.	2.01.	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tarakan	20 orang	46.600.000	APBD		20 orang	46.600.000
2.	14	.4.	2.01.	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Tarakan	2 kelompok	10.000.000	APBD		2 kelompok	10.000.000
2.	***14***	***.4.***	***2.02.***		***Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan***	***Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan***	***Tarakan***	***2 organisasi***	***10.000.000***	***APBD***		***2 organisasi***	***10.000.000***

					Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	***Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga***							
2.	14	.4.	2.02.	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tarakan	1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	5.000.000
2.	14	.4.	2.02.	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tarakan	1 laporan	5.000.000	APBD		1 laporan	10.000.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2025. Rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran APBD Kota Tarakan Tahun 2024.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam **tabel 6** sebagai berikut :

TABEL. 6

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Output/Outcome	Target Kinerja Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
									Target	Rp	
Meningkatnya tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana**	2.					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.774.403.139**	
		2.	8.	.			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
		2.	**8.**	**01.**	**.**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**3.931.789.883**	**Sekretariat**
		2.	***8.***	***01.***	***2.01.***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia***	***8 Dokumen***	***10.000.000***	***Sekretariat***
		2.	8.	01.	2.01.	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	10.000.000	Sekretariat
		2.	***8.***	***01.***	***2.02.***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu***	***2 Layanan***	***3.696.214.978***	***Sekretariat***
		2.	8.	01.	2.02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bln	3.637.288.978	Sekretariat
		2.	8.	01.	2.02.	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	58.926.000	Sekretariat
		2.	***8.***	***01.***	***2.05.***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian***	***0 Layanan***	***0***	***Sekretariat***
		2.	8.	01	2.	00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	0 Unit	0	Sekretariat

				.	05.	01					
		2.	8.	01.	2.05.	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	0 Paket	0	Sekretariat
		2.	***8.***	***01.***	***2.06.***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana***	***3 Layanan***	***62.417.700***	***Sekretariat***
		2.	8.	01.	2.06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	24.996.060	Sekretariat
		2.	8.	01.	2.06.	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.979.840	Sekretariat
		2.	8.	01.	2.06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	32.441.800	Sekretariat
		2.	***8.***	***01.***	***2.07.***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah aset/BMD yang diadakan***	***7 Unit***	***44.277.850***	***Sekretariat***
		2.	8.	01.	2.07.	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Sekretariat
		2.	8.	01.	2.07.	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	44.277.850	Sekretariat
		2.	8.	01.	2.07.	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Sekretariat
		2.	***8.***	***01.***	***2.08.***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia***	***2 Layanan***	***73.516.021***	***Sekretariat***

		2.	8.	01.	2.08.	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	Sekretariat
		2.	8.	01.	2.08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	71.516.021	Sekretariat
		2.	***8.***	***01.***	***2.09.***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah aset/BMD yang dipelihara***	***37 Unit***	***45.363.334***	***Sekretariat***
		2.	8.	01.	2.09.	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	2.709.000	Sekretariat
		2.	8.	01.	2.09.	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	32.784.334	Sekretariat
		2.	8.	01.	2.09.	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000	Sekretariat
		2.	***8.***	***01.***	***2.09.***	***09***	***Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya***	***Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi***	***0 Unit***	-	***Sekretariat***
Meningkatkan kesetaraan gender	**Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**	**2.**	**8.**	**02.**	**.**		**Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**1. Cakupan PUG yang aktif**	**12%**	**263.842.640**	**Bidang PPPA**
		2.	***8.***	***02.***	***2.01.***		***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG***	***1 lembaga***	***13.842.640***	***Bidang PPPA***
		2.	8.	02.	2.01.	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	30 orang	13.842.640	Bidang PPPA

		2.	8.	02.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	**2 lembaga**	**250.000.000**	**Bidang PPPA**
		2.	8.	02.	2.03.	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	250.000.000	Bidang PPPA
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	**Meningkatkan peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak anak**	**2.**	**8.**	**03.**	**.**		**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani**	**100%**	**147.651.920**	**Bidang PPPA**
		2.	***8.***	***03.***	***2.01.***		***Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan***	***7 Kegiatan***	***20.041.860***	***Bidang PPPA***
		2.	8.	03.	2.01.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	40.087.113	Bidang PPPA
		2.	***8.***	***03.***	***2.02.***		***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah kasus yang mendapat pelayanan***	***90 kasus***	***108.758.360***	***Bidang PPPA***
		2.	8.	03.	2.02.	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	15.369.500	Bidang PPPA
		2.	8.	03.	2.02.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	93.388.860	Bidang PPPA
		2.	***8.***	***03.***	***2.03.***		***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi***	***1 Lembaga***	***18.851.700***	***Bidang PPPA***

		2.8.03.03.02					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	18.851.700	Bidang PPPA
		2.8.04.					**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase Puspusga yang aktif**	**25%**	**45.649.290**	**Bidang PPPA**
		2.8.04.2.01.					***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi***	***10 buah***	***23.346.570***	***Bidang PPPA***
		2.8.04.2.01.0002					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	13.946.700	Bidang PPPA
		2.8.04.2.01.0003					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.399.870	Bidang PPPA
		2.8.02.2.03.					***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah lembaga yang dibina***	***2 organisasi***	***12.362.920***	***Bidang PPPA***
		2.8.02.2.03.0002					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362.920	Bidang PPPA
		2.8.04.2.03.					***Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak***	***40 Layanan***	***9.939.800***	***Bidang PPPA***
		2.8.04.2.03.0001					Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang	40 layanan	9.939.800	Bidang PPPA

								Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
		2.	**8.**	**05.**	**.**		**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak**	**100%**	***5.451.960***	**Bidang PPPA**
		2.	***8.***	***05.***	***2.01.***		***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen responsif gender***	***1 dokumen***	***5.451.960***	***Bidang PPPA***
		2.	8.	05.	2.01.	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.451.960	Bidang PPPA
		2.	**8.**	**06.**	**.**		**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Ketercapaian nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak**	**875**	**265.251.100**	**Bidang PPPA**
		2.	***8.***	***06.***	***2.01.***		***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk***	***1 gugus tugas***	***93.364.680***	***Bidang PPPA***
		2.	8.	06.	2.01.	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 organisasi	55.659.360	Bidang PPPA
		2.	8.	06.	2.01.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.705.320	Bidang PPPA
		2.	***8.***	***06.***	***2.02.***		***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota***	***Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif***	***4 lembaga***	***171.886.420***	***Bidang PPPA***
		2.	8.	06.	2.0	000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas	1 dokumen	150.000.000	Bidang PPPA

					2 .	1	Kabupaten/Kota	Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
		2 .	8 .	0 6 .	2 . 0 2 .	0 0 0 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	21.886.420	Bidang PPPA
		2 .	**8 .**	**0 7 .**	**.**		**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase korban kekerasan anak yang terlayani**	**100%**	**81.560.360**	**Bidang PPPA**
		2 .	***8 .***	***0 7 .***	***2 . 0 1 .***		***Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah kegiatan pencegahan kekeran terhadap anak***	***4 kegiatan***	***30.084.000***	***Bidang PPPA***
		2	0 8	0 7	2 . 0 1	0 0 0 4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahanKTA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Perangkat daerah	30.084.000	Bidang PPPA
		2 .	***8 .***	***0 7 .***	***2 . 0 2 .***		***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah kasus anak***	***90 kasus***	***30.084.000***	***Bidang PPPA***
		2	0 8	0 7	2 . 0 2	0 0 0 5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 kasus	22.635.197	Bidang PPPA
		2	0 8	0 7	2 . 0 2	0 0 0 6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1 laporan	84.224.530	Bidang PPPA
		2 .	***8 .***	***0 7 .***	***2 . 0 3 .***		***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yeng memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan***	***5 Lembaga***	***21.392.360***	***Bidang PPPA***
		2	0 8	0 7	2 . 0 3	0 0 0 6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah	1 Laporan	1.000.000	Bidang PPPA

								kabupaten			
		2	0 8	0 7	2 . 0 3	0 0 0 8	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)	20 orang	20.392.360	Bidang PPPA
Meningkatnya Keluarga Sejahtera	**Meningkatnya Aseptor KB**	**2 .**	**1 4**	**.. .**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**252.355.820**	**Bidang PPKB**
		2 .	**1 4**	**. 2 .**	**.**		**Program Pengendalian Penduduk**	**Persentase keluarga yang terdata**	**50%**	**90.237.520**	**Bidang PPKB**
		2 .	***1 4***	***. 2 .***	***2 . 0 2 .***		***Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen data keluarga***	***1 dokumen***	***14.400.000***	***Bidang PPKB***
		2 .	1 4	. 2 .	2 . 0 2 .	0 2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	49.958.800	Bidang PPKB
		2 .	1 4	. 2 .	2 . 0 2 .	1 1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 laporan	20.878.720	Bidang PPKB
		2 .	1 4	. 2 .	2 . 0 2 .	1 2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 dokumen	5.000.000	Bidang PPKB
		2 .	1 4	. 2 .	2 . 0 2 .	1 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	14.400.000	Bidang PPKB
		2 .	**1 4**	**. 3 .**	**.**		**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Persentase masyarakat yang terpapar isi program KKBPK**	**84%**	**74.518.800**	**Bidang PPKB**
		2 .	***1 4***	***. 3 .***	***2 . 0 1 .***		***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal***	***Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB***	***3 layanan***	***68.518.800***	***Bidang PPKB***
		2	1 4	0 3	2 . 0 1	0 0 0 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	2.000.000	Bidang PPKB
		2	1 4	0 3	2 . 0 1	0 0 1 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga	1 laporan	32.948.000	Bidang PPKB

								Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
		2	1 4	0 3	2 . 0 1	0 0 1 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	6.000.000	Bidang PPKB
		2	1 4	0 3	2 . 0 1	0 0 1 2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	2.800.000	Bidang PPKB
		2	1 4	0 3	2 . 0 1	0 0 1 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	14.770.800	Bidang PPKB
		2	1 4	0 3	2 . 0 1	0 0 1 4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	10.000.000	Bidang PPKB
		2 .	***1 4***	***. 3 .***	***2 . 0 2 .***		***Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)***	***Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif***	***17 orang***	***1.000.000***	**Bidang PPKB**
		2 .	1 4	. 3 .	2 . 0 2 .	0 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	1.000.000	Bidang PPKB

		2.	***14***	***.3.***	***2.03.***		***Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah pelayanan KB***	***4 layanan***	***4.000.000***	***Bidang PPKB***
		2	14	03	2.03	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan ObatKontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB keFasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	Bidang PPKB
		2	14	03	2.03	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 orang	1.000.000	Bidang PPKB
		2	14	03	2.03	006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	1.000.000	Bidang PPKB
		2	14	03	2.03	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1.000.000	Bidang PPKB
		2.	***14***	***.3.***	***2.04.***		***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB***	***Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolan program KKBPK***	***85 mitra kerja***	***2.000.000***	***Bidang PPKB***
		2	14	03	2.04	002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	1.000.000	Bidang PPKB
		2	14	03	2.04	006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1 dokumen	1.000.000	Bidang PPKB
		2.	**14**	**.4.**	**.**		**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**100%**	**86.599.050**	**Bidang PPKB**
		2.	***14***	***.4.***	***2.01.***		***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	***Jumlah kegiatan***	***2 kegiatan***	***76.599.050***	***Bidang PPKB***

		2	1 4	0 4	2 . 0 1	0 0 1 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	10.000.000	Bidang PPKB
		2	1 4	0 4	2 . 0 1	0 0 1 8	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	20 unit	9.999.050	Bidang PPKB
		2	1 4	0 4	2 . 0 1	0 0 1 9	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	1 laporan	46.600.000	Bidang PPKB
		2	1 4	0 4	2 . 0 1	0 0 2 8	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	10.000.000	Bidang PPKB
		2	***1 4***	***0 4***	***2 . 0 2***		***Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga***	***Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga***	***2 organisasi***	***10.000.000***	**Bidang PPKB**
		2	1 4	0 4	2 .	0 0	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan	1 laporan	5.000.000	Bidang PPKB

					0 2	0 5	Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
		2	1 4	0 4	2 . 0 2	0 0 0 6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000	Bidang PPKB

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025.

Rancangan Awal Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Tarakan, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina / IV a
NIP. 19720822 2010011 001